

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan menjadi salah satu jembatan yang ada pada kontribusi pemberian transmisi pada aspek ilmu pengetahuan, keyakinan, keterampilan serta etika, moral dan nilai dari generasi ke generasi. Seperti pada sebagaimana tertulis pada UU tentang sistem pendidikan nasional yakni Nomor 20 Tahun 2003, yakni:

“Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, maka pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar”

Mata rantai kemiskinan dapat diputus melalui pendidikan. Dengan pendidikan yang cukup, seseorang dapat hidup secara moral dan sesuai dengan harapan. Tentu saja, setiap orang menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri di masa depan. Pemberian pendidikan diharapkan dapat membantu setiap individu agar memiliki pencerahan dan baik perubahan hidup maupun pola pemikiran terhadap peserta didik.

Berdasarkan tujuan pemerintah dalam menjamin peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan pendidikan, dan usaha dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu pemerintah sudah seharusnya

mengeluarkan biaya dan menyediakan fasilitas untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes sehingga mampu menghadapi globalisasi.

Pembangunan dalam pendidikan harus wajib menjadi dasar terhadap adanya Indeks Pembangunan Manusia. Karena dari Indeks Pembangunan Manusia yang kemudian akan menjadi harapan dan fokus pembangunan pada dimensi pendidikan yang akan memunculkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkompentensi dan berkualitas. Menurut Muhammad Fauzan (2020) pengukuran mengenai pembangunan manusia untuk pertama kalinya dipelopori oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990.

Berdasar pada informasi Badan Pusat Statistik (BPS), UNDP sendiri memperkenalkan hal baru mengenai pengukuran pembangunan manusia yakni *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia. Semenjak itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipublikasikan secara berkala dalam *Human Development Report* (HDR). Berikut merupakan data IPM di Jawa Tengah pada tahun 2018- 2020:

Tabel 1. 1 Data IPM di Jawa Tengah tahun 2019-2020

No.	Nama Daerah	2018	2019	2020
1.	Kota Semarang	82.72	83,19	83,05
2.	Kota Salatiga	82.41	83,12	83,14
3.	Kota Surakarta	81.46	81,86	82,21
4.	Kota Magelang	78.31	78,80	78,99
5.	Kabupaten Sukoharjo	76.07	76,84	76,98
6.	Kabupaten Karanganyar	75.54	75,89	75,86
7.	Kabupaten Klaten	74.79	75,29	75,56
8.	Kota Tegal	74.44	74,93	75,07
9.	Kabupaten Kudus	74.58	74,94	75,00
10.	Kota Pekalongan	74.24	74,77	74,98
11.	Kabupaten Semarang	73.61	74,14	74,10

No.	Nama Daerah	2018	2019	2020
12.	Kabupaten Boyolali	73.22	73,80	74,25
13.	Kabupaten Sragen	72.96	73,43	73,96
14.	Kabupaten Purworejo	71.87	72,50	72,68
15.	Kabupaten Jepara	71.38	71,88	71,99
16.	Kabupaten Banyumas	71.30	71,96	71,98
17.	Kabupaten Kendal	71.28	71,97	72,29
18.	Kabupaten Demak	71.26	71,82	72,22
19.	Kabupaten Pati	70,71	71,35	71,77
20.	Kabupaten Rembang	69.46	70,15	70,02
21.	Kabupaten Cilacap	69.56	69,98	69,95
22.	Kabupaten Grobogan	69.32	69,86	69,87
23.	Kabupaten Wonogiri	69.37	69,98	70,25
24.	Kabupaten Magelang	69.11	69,87	69,87
25.	Kabupaten Pekalongan	68.97	69,71	69,63
26.	Kabupaten Temanggung	68.83	69,56	69,57
27.	Kabupaten Kebumen	68.80	69,60	69,81
28.	Kabupaten Purbalingga	68.41	68,99	68,97
29.	Kabupaten Blora	67.95	68,65	68,84
30.	Kabupaten Batang	67.86	68,42	68,65
31.	Kabupaten Wonosobo	67,81	68,27	68,22
32.	Kabupaten Tegal	67.33	68,24	68,39
33.	Kabupaten Banjarnegara	66.54	67,34	67,45
34.	Kabupaten Brebes	65.68	66,12	66,11
35.	Kabupaten Pemalang	65,67	66,32	66,32

Sumber: Kabupaten Brebes dalam Angka 2021 (BPS Kabupaten Brebes)

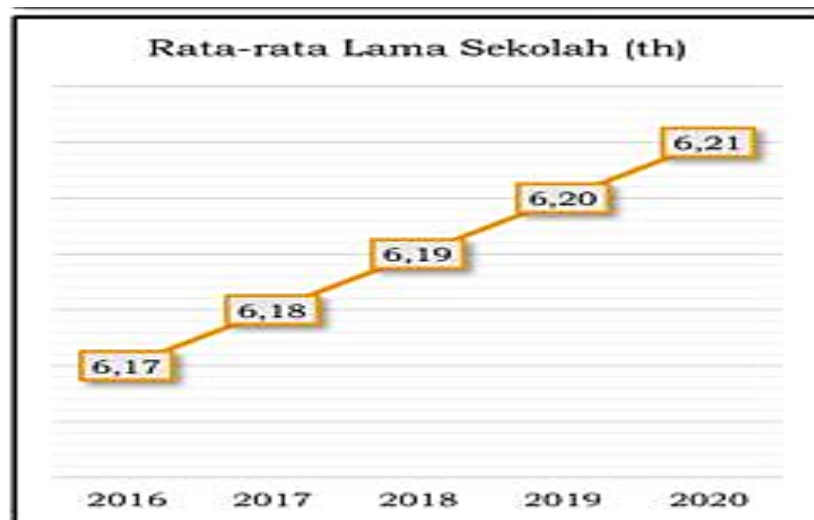
Tabel 1.1 menjelaskan bahwa, pada tahun 2018 Kota Semarang menjadi kabupaten dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 82,72 kemudian disusul oleh Kota Salatiga sebesar 82,41 dan selanjutnya disusul Kota Surakarta sebesar 81,46 ketiga kota tersebut menduduki posisi teratas di tahun 2018. Kemudian untuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah pada Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Pemalang sebesar 65,67 kemudian di atasnya ada Kabupaten Brebes dengan capaian sebesar 65,68. Kemudian pada tahun 2019 Kota Semarang masih menduduki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi sebesar 83,19,

kemudian disusul oleh Kota Salatiga sebesar 83,12 dan Kota Surakarta sebesar 81,86. Namun, pada tahun 2019 Kabupaten Brebes menduduki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan capaian terendah di Jawa Tengah sebesar 66,12, kemudian di atasnya ada Kabupaten Pemasang sebesar 66,32. Pada tahun 2020 capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan capaian tertinggi yaitu Kota Salatiga sebesar 83,14 kemudian disusul oleh Kota Semarang sebesar 83,05 dan diposisi ketiga yaitu Kota Surakarta sebesar 82,21. Dan pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di tahun 2020 yaitu Kabupaten Brebes sebesar 66,11 dan di atasnya ada Kabupaten Pemasang sebesar 66,32. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2018 Kabupaten Brebes mencapai angka 65,68 dan 2019 mencapai angka 66,12. Dalam hal ini Kabupaten Brebes mengalami kenaikan Indeks Pembangunan Manusia, namun di tahun 2020 hanya mencapai 66,11 yang artinya mengalami sedikit penurunan.

Pembangunan pada dasarnya diarahkan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan semua masyarakat tanpa terkecuali. IPM itu sendiri yang bisa mengukur ukuran kesejahteraan dengan memberikan representasi mengenai hasil pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertimbangan materi atau ekonomi namun tentang ukuran kualitas hidup manusia. Ada 3 (tiga) hal yang dipertimbangkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain : standar kehidupan layak, usia harapan hidup, dan tingkat pendidikan. Hal tersebut yang kemudian dianggap sebagai representatif untuk ukuran tentang kualitas hidup manusia. Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) ada beberapa indikator yang sudah tidak akurat untuk digunakan pada perhitungan IPM. Untuk

mengukur pendidikan secara utuh sudah tidak relevan menggunakan Angka melek huruf, karena hal tersebut tidak dapat merepresentasikan kualitas dari pendidikan. Sehingga pada metode baru dalam mengukur kualitas pendidikan dapat menggunakan indikator yang lebih tepat yaitu dengan mengukur rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dengan indikator tersebut berhasil diperoleh representasi yang lebih relevan dalam mengukur pendidikan. Berikut merupakan gambar dari angka rata-rata lama sekolah yang mana menjadi indikator guna mengukur kualitas dari pendidikan.

Gambar 1. 1 Rata- rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020



Sumber : RKPД Kabupaten Brebes Tahun 2022

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Brebes selalu mendapati kenaikan. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Brebes sebesar 6,17 kemudian di tahun 2017 yaitu sebesar 6,18 selanjutnya pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,19 dilanjut tahun 2019 yakni sebesar 6,20 dan di tahun 2020 sendiri Rata-

rata Lama Sekolah di Kabupaten Brebes atau biasa disebut RLS Kabupaten Brebes meraih angka sebesar 6,21. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun angka dari Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes mengalami kenaikan. Rata-rata Lama Sekolah atau RLS sendiri diartikan sebagai total tahun yang penduduk gunakan untuk menjalani Pendidikan formal. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Brebes pada tahun 2020 sebesar 6,21 (dalam tahun) dapat diartikan bahwa pendidikan yang rata-rata ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Brebes hanya 6 tahun atau sepadan dengan lulusan Sekolah Dasar, faktor tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu masih adanya siswa yang mengalami putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak bersekolah, lulusan SD/MI yang kemudian tidak melanjutkan pada jenjang SMP/ MTs. Berikut adalah data tentang Angka Putus Sekolah (APtS) di Kabupaten Brebes tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 1. 2 Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI	206	262	228	129	247
Jumlah Siswa	195.448	193.284	192.017	191.922	187.858
Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs	316	294	214	274	443
Jumlah Siswa	90.692	89.745	87.224	86.773	87.064
Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA/SMK/MA	164	452	585	77	58
Jumlah Siswa	59.387	56.624	66.962	66.384	66.666

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa pada pada jenjang pendidikan SD/MI jumlah siswa putus sekolah di tahun 2016 sebanyak 206, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan banyak 262, dilanjut pada tahun berikutnya yaitu 2018 sebanyak 228, dan kemudian pada tahun 2019 berjumlah 129 dan 2020 sebanyak 247. Kemudian besaran anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs di tahun 2016 sejumlah 316, di lanjut pada tahun 2017 sejumlah 294, kemudian pada tahun 2018 sejumlah 214, selanjutnya ditahun 2019 sejumlah 274 dan kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan banyak 443 siswa.

Pada jenjang SMA/SMK/MA di tahun 2016 jumlah anak putus sekolah sebanyak 164, kemudian tahun 2017 sebanyak 452, dan di tahun 2018 dengan jumlah 585, dilanjut tahun 2019 dengan jumlah 77 dan ditahun 2020 hanya sebanyak 58 siswa. Dapat dilihat bahwa masing- masing jenjang mengalami ketidakstabilan, baik pada jenjang pendidikan SD/ MI, kemudian SMP/ MTs maupun SMA/SMK/MA. Namun dapat dilihat bahwa pada 2018 hingga 2020 pada jenjang SMP/MTs terus mengalami peningkatan angka putus sekolah, berkitan juga dengan adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap meningkatnya angka putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs dengan jumlah 443 siswa di tahun 2020. Kemudian selain data mengenai angka putus sekolah, disini juga terdapat data penyebaran ATS (Anak Tidak Sekolah) per-Kecamatan di Kabupaten Brebes pada tahun 2018:

Tabel 1. 3 Jumlah Persebaran Anak Putus Sekolah dan Putus Jenjang Per-Kecamatan di Kabupaten Brebes 2018

No.	Kecamatan	Jumlah ATS
1.	Bantarkawung	2.035
2.	Losari	1.899
3.	Ketanggungan	1.359
4.	Bulakamba	1.292
5.	Larangan	1.260
6.	Tanjung	1.220
7.	Paguyangan	1.195
8.	Banjarharjo	1.153
9.	Salem	1.017
10.	Jatibarang	979
11.	Brebes	760
12.	Tonjong	688
13.	Songgom	670
14.	Wanasari	645
15.	Bumiayu	512
16.	Sirampog	410
17.	Kersana	326
Jumlah		17.420

Sumber : Data diolah dari Dindikpora Brebes / <https://gkb.brebeskab.go.id>

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa, jumlah persebaran tertinggi di tahun 2018 ada pada Kecamatan Bantarkawung sebesar 2.035 kemudian disusul oleh Kecamatan Losari sebesar 1.899 dan disusul oleh Kecamatan Ketanggungan sebesar 1.359. Dan jumlah persebaran terendah yaitu Kecamatan Kersana sebesar 326.

Undang- undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai ganti UU No. 32 Tahun 2004 yang dipandang sudah tidak sinkron dengan ketatanegaraan, perubahan lingkungan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. . “Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum,” bunyi Bab IV Pasal 9 Ayat 1

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintah absolut yakni urusan yang secara penuh berada di bawah lingkup pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren yang merupakan kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah urusan yang dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah daerah provinsi/kota/ kabupaten dan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan umum dengan demikian didefinisikan sebagai urusan yang berada di bawah lingkup Presiden sebagai kepala negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1, pemenuhan kebutuhan pokok warga negara menjadi salah satu urusan wajib pemerintah yang terkait dengan pendidikan yang mana hal ini disebut sebagai bentuk pelayanan publik. Menetapkan standar pendidikan nasional dan mengelola pendidikan tinggi digambarkan sebagai tanggungjawab pemerintah pusat dalam hal pengelolaan pendidikan. Kemudian, menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam urusan mengelola pendidikan khusus dan pendidikan menengah. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota bertugas mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan dasar (SD dan SMP).

Menurut Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, UUD 1945 memberikan jaminan setiap warga negara Indonesia dapat menerima akses pendidikan atau pengajaran. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan perluasan pada cakupan pemberian bantuan tunai pendidikan melalui Program Indonesia Pintar guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mendorong kelangsungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk menjamin dan memastikan semua anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu agar bisa mendapatkan akses pendidikan dasar hingga lulus pendidikan menengah atas. Terbentuknya program ini sebagai bentuk melanjutkan kebijakan dari program sebelumnya yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai diupayakan pada Juli tahun 2005 serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang berjalan sejak tahun 2008. Program Indonesia Pintar yang diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar bertujuan :

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/ rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan
- 3) Menarik kembali siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mencapatakan layanan pendidikan di sekolah/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/ satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Berdasarkan pada Pasal 4 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dijelaskan bahwa PIP yang diperuntukkan bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:

- 1) Peserta Didik pemegang KIP;
- 2) Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - a. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
 - b. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
 - c. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti social/panti asuhan;
 - d. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
 - e. Peserta Didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
 - f. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Perasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau
 - g. Peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Anak atau peserta didik yang termasuk dalam prioritas sasaran tersebut dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pemangku kepentingan.

Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Arina Riska (Riska & Rostyaningsih, 2013) dengan judul ‘Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus menjelaskan mengenai tingginya biaya sekolah membuat sebagian orang tua dari peserta didik merasa berat untuk menanggung biaya pendidikan tersebut. Baik biaya pendidikan yang digunakan untuk buku, iuran sekolah, alat tulis dan seragam. Dan biaya lainnya seperti uang saku, transportasi, dan lain-lain. Maka dari itu sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, sebagai upaya keberlanjutan dan dalam rangka perluasan sasaran program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Indonesia Pintar (PIP) diperkenalkan pada 3 November 2014 di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu dan/atau kurang mampu membiayai pendidikan anaknya.

Program Indonesia Pintar dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan anak berusia sekolah dari keluarga dengan kondisi miskin dan rentan miskin. Kartu yang dirancang khusus untuk keluarga miskin dan rentan yang ingin anaknya mengenyam pendidikan(usia 6 hingga 21 tahun) secara gratis disebut Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Penerima KIP diberikan bantuan dengan bentuk dana tunai yang berasal dari pemerintah secara reguler yang disimpan dalam fungsi kartu KIP yang digunakan untuk bersekolah secara gratis, baik untuk peserta didik yang sudah terdaftar maupun untuk peserta didik yang belum terdaftar di sekolah dengan

tujuan supaya angka putus sekolah dapat turun dengan drastis, berikut merupakan tabel pendistribusian Program Indonesia Pintar yang ada di Kabupaten Brebes dari tahun 2019 hingga 2021:

Tabel 1. 4 Data Penyaluran-Program Indonesia Pintar (PIP) SMP Kabupaten Brebes Tahun 2019- 2021

Kecamatan (1)	2019		2020	
	Disalurkan (2)	Dicairkan (3)	Disalurkan (4)	Dicairkan (5)
Kec. Banjarharjo	1.664	1.613	2.158	2.095
Kec.Bantarkawung	2.013	1.997	2.313	2.284
Kec. Brebes	3.577	3.562	4.069	3.814
Kec. Bulakamba	2.791	2.762	3.095	2.906
Kec. Bumiayu	2.664	2.657	2.930	2.862
Kec. Jatibarang	1.658	1.623	1.727	1.642
Kec. Kersana	1.535	1.522	1.754	1.679
Kec.Ketanggungan	2.596	2.566	2.705	2.591
Kec. Larangan	2.092	2.017	2.118	1.892
Kec. Losari	3.227	3.218	2.993	2.903
Kec. Paguyangan	3.197	3.106	3.224	3.075
Kec. Salem	1.260	1.244	1.804	1.683
Kec. Sirampog	1.170	1.139	1.540	1.456
Kec. Songgom	1.736	1.690	1.992	1.837
Kec. Tanjung	3.209	3.176	3.089	2.914
Kec. Tonjong	1.513	1.476	1.824	1.665
Kec. Wanasari	2.679	2.540	2.883	2.586

Sumber : Si Pintar (pip.kemdikbud.go.id) <https://pip.kemdikbud.go.id>

Tabel 1.4 tersebut menunjukkan bahwa penyaluran KIP di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes. Berdasar pada data tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun

2019 penyaluran terbanyak terdapat pada Kecamatan Brebes, sebesar 3.577 siswa dan penyaluran paling sedikit yaitu Kecamatan Sirampog hanya sekitar 1.170 siswa. Pada tahun 2020 Kecamatan Brebes juga menjadi Kecamatan dengan penyaluran tertinggi sebesar 4.069, lebih tinggi angka penyalurannya dibanding tahun sebelumnya dan Kecamatan Sirampog juga menjadi Kecamatan yang paling sedikit penyalurannya hanya sebesar 1.456, namun mengalami kenaikan jumlah penyaluran siswa dari tahun sebelumnya. Kemudian selain data penyaluran Program Indonesia Pintar berikut adalah data penyaluran anggaran dari Program Indonesia Pintar tahun 2019-2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Dana Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) SMP Kabupaten Brebes 2019-2020

Kecamatan	2019		2020	
	Salurkan	Cairkan	Salurkan	Cairkan
Banjarharjo	984.375.000	948.750.000	1.322.250.000	1.285.500.000
Bantarkawung	1.176.000.000	1.116.625.000	1.386.000.000	1.369.875.000
Brebes	2.042.250.000	2.031.375.000	2.467.875.000	2.331.375.000
Bulakamba	1.590.375.000	1.571.625.000	1.908.000.000	1.792.875.000
Bumiayu	1.559.625.000	1.555.125.000	1.789.500.000	1.746.375.000
Jatibarang	963.750.000	940.875.000	1.037.250.000	996.375.000
Kersana	897.000.000	888.375.000	1.081.125.000	1.038.750.000
Ketanggungan	1.532.625.000	1.513.500.000	1.656.000.000	1.582.875.000
Larangan	1.214.625.000	1.166.250.000	1.276.500.000	1.147.875.000
Losari	1.901.250.000	1.895.625.000	1.839.750.000	1.781.625.000
Paguyangan	1.855.125.000	1.794.000.000	1.921.500.000	1.842.375.000
Salem	750.750.000	738.750.000	1.076.250.000	1.005.375.000
Sirampog	684.375.000	666.000.000	941.250.000	893.250.000
Songgom	1.015.875.000	983.250.000	1.234.875.000	1.137.375.000
Tanjung	1.836.750.000	1.817.625.000	1.908.750.000	1.804.500.000
Tonjong	884.625.000	858.750.000	1.098.375.000	1.000.500.000

Sumber : Si Pintar (pip.kemdikbud.go.id) <https://pip.kemdikbud.go.id>

Berdasarkan tabel 1.5 menjelaskan bahwa tersebut menunjukkan bahwa penyaluran KIP di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2019 penyaluran dana terbanyak terdapat pada Kecamatan Brebes, sebesar Rp. 2.042.250.000 dan penyaluran dana paling sedikit yaitu Kecamatan Sirampog hanya sekitar 687.375.000. Pada tahun 2020 Kecamatan Brebes juga menjadi Kecamatan dengan penyaluran dana tertinggi sebesar RP. 2.467.875.000, lebih tinggi angka penyalurannya dibanding tahun sebelumnya dan Kecamatan Sirampog juga menjadi Kecamatan yang paling sedikit penyaluran dananya hanya sebesar 941.250.000, namun mengalami kenaikan jumlah penyaluran danadari tahun sebelumnya.

Pada penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh Riska Srihandayani (Djoyosuroto, Prasetyono, & Mulyani, 2018) dengan judul 'Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga'. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan penerima program yang tidak menggunakan bantuan sepenuhnya yang mereka terima untuk membiayai pendidikan di sekolah. Sekitar 85% dari dana bantuan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, namun 15% lainnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi. Dalam hal koordinasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa di SMA Negeri 2 Dumoga tahun 2015, terdapat 26 peserta didik yang semuanya memiliki KIP. Siswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) setidaknya telah memenuhi satu dari sekian banyak syarat atau kriteria. Penerima KIP dari SMA Negeri 2 Dumoga dapat disebut layak dengan melihat keadaan

pekerjaan dari orang tuanya dan juga keadaan kehidupannya yang masih kurang sejahtera, karena kepemilikannya juga sesuai dengan keadaan dan kondisi keluarga siswa. Kemudian pada aspek interpretasi, siswa dan guru yang bertanggung jawab langsung ke Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk menarik dana dari Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pihak sekolah tidak mungkin membiarkan penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) lepas dari pengawasannya tanpa adanya tanggung jawab dari mereka, sehingga hal ini menjadi faktor yang harus diperhatikan. Selain itu, berdasar pada surat penyaluran bantuan, yang menyebutkan bahwa pembagian dana tidak dapat dilaksanakan secara bersama atau dilakukan secara kolektif, sehingga siswa penerima bantuan harus mengambil sendiri dengan guru yang telah ditunjuk oleh sekolah. Temuan penelitian pada aspek aplikasi di SMA Negeri 2 Dumoga mengungkapkan bahwa siswa dari kalangan berpenghasilan rendah atau kurang mampu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya diberikan Kartu Indonesia Pintar .

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Riska Srihandayani (Djoyosuroto et al., 2018) dengan judul ‘Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SMA Negeri 2 Dumoga’ terdapat faktor pendukung nya seperti: 1) terdapat informasi dari pihak dinas kepada sekolah dan membuka informasi secara online selama 24 jam tentang edaran, buku panduan, serta dengan melakukan sosialisasi melalui lisan. 2) Keputusan pemerintah pusat dalam penggunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisikan informasi siswa dari kelas X sampai kelas XII. Dengan adanya Dapodik diharapkan akan memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data mengenai keluarga yang

miskin secara lebih tepat serta akurat. 3) Siswa akan menjadi lebih bersemangat sekolah karena dapat terpenuhinya peralatan sekolah sehingga mereka tidak merasa tertinggal dengan teman-teman yang lain.

Penelitian ini juga terdapat faktor penghambat, antara lain : 1) Meskipun program pendampingan KIP terus digalakkan oleh pihak-pihak yang terafiliasi, namun penelaahan berkala terhadap program tersebut benar-benar membawa perbaikan, terutama pada mekanismenya. Karena itu, para pelaksana terus memahami mekanisme baru dari waktu ke waktu, yang sebenarnya menyebabkan kesalahpahaman di pihak mereka tentang mekanisme baru. 2) Ketika siswa menerima uang dari Kartu Indonesia Pintar, mereka sering lalai menggunakannya untuk pembelian di luar sekolah dibandingkan untuk membiayai pendidikan 3) Penggunaan uang siswa yang menerima bantuan, baik untuk keperluan pendidikan maupun non-pendidikan, tidak dapat diketahui secara pasti oleh pihak sekolah.

Karena ukurannya yang luas dan populasi yang besar, Kabupaten Brebes berupaya dengan keterjangkauan layanan penting seperti akses terhadap pendidikan. Dari Kecamatan Bantarkawung dapat dilihat bahwa setiap sekolah memiliki jumlah siswa peserta Program Indonesia Pintar antara lain:

Tabel 1. 6 Jumlah Siswa Penerima Program Indonesia Pintar SMP di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

No.	Nama Sekolah	2018	2019	2020
1	SMP N 1 Bantarkawung	617	593	619
2	SMP N 2 Bantarkawung	140	137	164
3	SMP N 3 Satu Atap Bantarkawung	78	72	88
4	SMP N 4 Satu Atap Bantarkawung	59	48	57
5	SMP N 5 Satu Atap Bantarkawung	151	155	171
6	SMP N 6 Bantarkawung	135	109	102

No.	Nama Sekolah	2018	2019	2020
7	SMP N 7 Satu Atap Bantarkawung	111	105	90
8	SMP Putra Bangsa	207	176	201
9	SMP Al- Bahri	26	43	87
10	SMP Bustanul Ulum	209	197	202
11	SMP Maarif NU 4	268	274	396
12	SMP Maarif NU Darussalam	43	36	40
13	SMP Muhammadiyah Bantarkawung	35	24	44
Jumlah		2.134	1.997	2.284

Sumber : Si Pintar (pip.kemdikbud.go.id) <https://pip.kemdikbud.go.id>

Tabel 1.6 menjelaskan bahwa jumlah peserta didik yang menjadi penerima Program Indonesia Pintar SMP tahun 2018-2019 di Kecamatan Bantarkawung menunjukkan angka yang naik turun atau fluktuatif. Pada tahun 2018 ada sejumlah 2.134 siswa penerima Program Indonesia Pintar, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1.997 peserta didik dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 2.284 siswa. Sama halnya dengan di Kecamatan Bantarkawung, jumlah siswa yang terdapat pada SMP N 3 Satu Atap Bantarkawung juga menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2018 jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar di SMP N 3 Satu Atap Bantarkawung mencapai 78 siswa, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 72 siswa, dan kemudian pada tahun 2020 mendapati kenaikan sebesar 88 siswa.

Sebagaimana dalam tujuan PIP yang tertuang pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar yang mana adanya PIP bertujuan agar mencegah siswa putus sekolah. Oleh sebab itu penulis ingin melaksanakan penelitian secara lebih lanjut mengenai implementasi Program Indonesia Pintar khususnya pada SMP Negeri 3 Satu Atap

Bantarkawung berhubungan dengan tujuan memberikan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan dalam upaya memangkas angka putus sekolah dengan memberikan bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berdasarkan deskripsi yang ada didalam permasalahan ini, maka penulis akan mengangkat pertanyaan penelitian yaitu **“Mengapa masih banyak anak putus sekolah di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes ?”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Terdapat masyarakat penerima Program Indonesia Pintar di Kecamatan Bantarkawung yang belum menggunakan bantuan Program Indonesia Pintar sesuai dengan petunjuk penggunaan bantuan.
2. Belum optimalnya mekanisme dalam menentukan sasaran bantuan Program Indonesia Pintar dengan masih adanya salah sasaran dari Program Indonesia Pintar
3. Terdapat kendala proses pencairan bantuan Program Indonesia Pintar yang dapat mengganggu pelaksanaan Program Indonesia Pintar

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan dari Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dari Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung.
2. Untuk mengidentifikasi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasar pada judul penelitian tersebut, peneliti mengharapkan agar penelitian ini kedepannya dapat memberikan banyak manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, berikut merupakan manfaat yang peneliti harapkan yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Dilakukannya penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

2. Kegunaan secara praktis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atas saran bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, dan SMP Negeri 3 Satu Atap Kecamatan Bantarkawung dalam memilih langkah yang tepat pada upaya meningkatkan peran dan fungsi Program Indonesia Pintar Kabupaten Brebes sehingga nantinya dapat meningkatkan pembangunan pada bidang pendidikan.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 7 Penelitian Terdahulu

Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil/ Temuan
Budi Widodo, 2016. Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di Smk Cokroaminoto Pandak.	Melihat kesiapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP), implementasi PIP, seperti penggunaan dana PIP di SMK Cokroaminoto Pandak, apa saja faktor yang mendorong dan menghambat penggunaan dana PIP di SMK Cokroaminoto Pandak.	Kuantitatif	Pada penelitian tersebut dihasilkan penelitian bahwa rata-rata persentase pemanfaatan PIP yaitu sebanyak 86,51%. Beberapa hal yang menjadi pendorong pemanfaatan PIP yakni adanya pendataan awal bagi siswa miskin, kebijakan sekolah mengelola dana PIP dan tim pelaksana PIP selalu sama. Namun dalam pelaksanaannya masih ditenukan penghambat seperti kurangnya sosialisasi mengenai PIP, adanya pemberitahuan mengenai informasi yang terlambat, waktu pencairan tidak tepat, dan tidak adanya pengawasan dari dinas terkait.
Muhammad Sulhan dan Totok Sasongko, 2017. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota.	Berupaya mengklarifikasi faktor pendorong pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan melalui penggunaan Kartu Jaminan Sosial dan KIP di lingkungan Desa Kauman.	Kualitatif	Pada penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui pembagian KPS dan KIP dilaksanakan dengan studi pendahuluan terlebih dahulu, kemudian melakukan survey serta dilakukan pengecekan area yang dianggap memenuhi kriteria untuk menerima bantuan dari pemerintah. Dilihat dari adanya pengelompokan masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas terkait dalam rangka untuk memfasilitasi pembagian KPS dan KIP khusus nya masyarakat Kecamatan Kauman yang jumlah populasinya mencapai 560 penduduk ditunjukkan dengan data bahwa masyarakat miskin yang berhak menerima KPS sebesar 30% sedangkan masyarakat miskin yang berhak menerima KIP sebesar 5%.
Iliya Arina Riska, Dra. Dewi	Tujuan dari penelitian ini adalah	Kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagian kecil orangtua penerima PIP merasa belum terbantu. Yang mana

Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil/ Temuan
Rostyaningsih, M.Si, 2013. Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus	untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan mengkaji apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaannya di SMP Satu Atap 3 Gebog Kudus.		faktor penyebabnya yaitu dari lingkungan sosial, dimana orangtua penerima PIP tidak faham terhadap teknis pelaksanaan program . pelaksanaan program juga hanya sebatas memberikan bantuan biaya tanpa melihat dari aspek lain seperti kualitas siswa.
Riska Srihandayani Djoyosuroto, 2018. Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SMA Negeri 2 Dumoga	Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengkaji program KIP di SMA Negeri 2 Dumoga serta unsur-unsur yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya.	Kualitatif	Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa siswa yang menerima bantuan KIP sudah memenuhi satu kriteria dari berbagai kriteria yang sudah ditentukan. Beberapa hal yang menjadi pendukung pelaksanaan KIP yaitu informasi dari pihak dinas baik secara rutin ke sekolah maupun secara online, Dapodik ditujukan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator penentu dalam menentukan target/ sasaran penerima program KIP. Akan tetapi dalam penelitian ini masih terdapat beberapa penghambat seperti evaluasi program KIP yang dilakukan pada setiap periode program justru menyebabkan terjadinya perubahan terutama pada mekanismenya yang kemudian mengakibatkan pihak pelaksana mengalami kebingungan, serta terjadinya penyalahgunaan dana KIP.
Vivie Haryanti R, 2016. Kesiapan Institusi Pelaksana Dalam Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Untuk Tingkat Sekolah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan institusi dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar bagi siswa miskin	Kualitatif	Pada penelitian ini mendapati hasil bahwa, pada awal pelaksanaan program tidak terdapat adanya saling koordinasi dan kerjasama beberapa institusi. Institusi yang ada di bawah Kementerian tidak mengetahui sudah sampai sejauh mana perkembangan program. Meskipun demikian kondisi tersebut tidak menjadipengaruh besar sebab pada pelaksanaan program tetap bisa berjalan dan dana dapat disalurkan kepada

Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil/ Temuan
Menengah Atas (SMA) di Wilayah Jakarta Selatan			penerima. Tetapi, kurangnya kerjasama antar pelaksana membuat sasaran dari dana PIP menjadi kurang tepat.
Lilis Novia Saraswati, 2017. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Pip) Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.	Kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa proses Implementasi PIP belum terlaksana secara maksimal sebagaimana mestinya hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan PIP seperti belum akuratnya data yang digunakan dalam penentuan calon penerima KIP, terjadinya keterlambatan waktu pencairan dana PIP, kurang optimalnya sosialisasi, waktu verifikasi kepemilikan KIP yang tergolong, serta masih rendahnya kesadaran wali murid mengenai penggunaan bantuan PIP.
Dwi Damayanti, 2018. Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar Oleh Keluarga Miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung.	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana KIP digunakan oleh keluarga miskin di Desa Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung. Fokus kajiannya adalah seberapa efektif dan efisien penggunaan kartu-kartu tersebut.	Kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan bantuan Kartu Indonesia Pintar yang ada pada Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung pada tahun 2017 sebagian orang tua memanfaatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar diperuntukkan untuk membeli buku tulis dan alat tulis, sedangkan sebagian orang tua penerima tidak memanfaatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk iuran bimbingan belajar dan iuran bulanan karena sudah ditanggung pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan pada tabel 1.9, terdapat beberapa perbedaan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan ketujuh penelitian ilmiah yang penulis gunakan sebagai referensi, walaupun ada beberapa kesamaan fokus penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Publik

serta kesamaan metode penelitian yang digunakan. Dalam hal lain terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah mengenai tujuan implementasi serta lokus penelitian. Peneliti membahas penelitian tentang Implementasi Program Indonesia Pintar pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung, Kabupaten Brebes.

1.6.2. Administrasi Publik

Siagian (Tahir, 2011:2) mengemukakan bahwa Administrasi Negara merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintahan dari sebuah negara dalam upaya mencapai tujuan negara.

Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3) berpendapat bahwa administrasi publik merupakan sebuah proses yang mana sumberdaya dan personel publik dikoordinasikan dan diorganisir yang ditujukan guna memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan- keputusan mengenai kebijakan publik (Tahir, 2011:2).

John M. Pffifner dan Robert V. Presthus (1960:4,5,6) mengemukakan pendapat bahwa Administrasi Negara diartikan sebagai koordinasi beberapa upaya perorangan dan kelompok dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal tersebut terutama meliputi tugas sehari-hari pemerintah (Tahir, 2011).

Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (Tahir, 2011:3) menjelaskan pendapatnya bahwa Administrasi Negara mencakup ketiga cabang

pemerintahan yaitu yudikatif, legislative, dan eksekutif serta hubungan yang ada di antara mereka.

Doglas dalam Stillman (1992:2) berpendapat bahwa Administrasi Publik merupakan produksi barang dan jasa yang diciptakan untuk melayani kebutuhan warga negara (Tahir, 20112).

Berdasar pada rumusan dari para ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses terjadinya aktifitas manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah (eksekutif) dengan mengikutsertakan yudikatif dan legislatif serta adanya peran masyarakat untuk mencapai visi dan misi pemerintah.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

1. Paradigma I (1990- 1926) Dikotomi Politik dan Administrasi yaitu adanya pembagian antara administrasi dan politik dimanifestasikan oleh pembagian antara legislatif yang tugasnya mengutarakan kehendak dari rakyat, dengan badan eksekutif yang memiliki tugas dalam mengartikulasikan kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang memiliki tugas melaksanakan keinginan rakyat. Ini dapat disimpulkan bahwa paradigma I ditekankan pada *locus*-nya, yaitu mempersoalkan di mana semestinya administrasi negara berada.
2. Paradima II (1927-1937) Paradigma Prinsip- Prinsip Administrasi memiliki fokus pada penekanan prinsip- prinsip administrasi negara yang diakui berfungsi secara umum pada semua bentuk organisasi dan pada

lingkungan sosial budaya. Prinsip-prinsip administrasi negara yang dimaksud tersebut adalah terdapatnya sebuah kenyataan, bahwa administrasi tanpa memperhatikan lingkungan, fungsi, kebudayaan, kerangka institusi atau misi, yang kemudian dapat digunakan dan diikuti pada semua bidang tanpa ada kecuali. Kenyataan ini menegaskan bahwa pada prinsip-prinsip administrasi tersebut dapat digunakan dan digunakan oleh negara- negara yang kebudayaannya tidak sama, fungsi, misi, kerangka institusi dan atau lingkungan.

3. Paradigma III (1950-1970) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, paradigma tersebut menjelaskan bahwa tidak selayaknya ada dikotomi antara administrasi negara dan politik sebab sebenarnya tidak benar-benar ada. Pada hal ini, administrasi negara bukan menjadi *value free* atau dapat berguna dimana saja namun justru nilai-nilai atau *value* tertentu yang mempengaruhi. Paradigma ini mengakui studi administrasi negara merupakan anasir dari ilmu politik, namun hanya ada perbedaan pada titik beratnya. Ilmu politik sendiri berfokus terhadap penyusunan dari kebijakan kekuatan sosial politik yang ada pada luar birokrasi, sedangkan administrasi negara fokusnya pada penyusunan kebijakan terhadap tubuh birokrasi, namun tetap berkaitan dengan sistem politik yang berlaku (Ibrahim, 2009:6).
4. Paradigma IV (1956-1970) Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Menurut paradigma ini menjelaskan bahwa ilmu administrasi negara yang merupakan subbidang ilmu politik semestinya dikembangkan

lebih lanjut melalui dua cara yang saling melengkapi: pertama, dengan mengembangkan ilmu administrasi yang semata-mata berlandaskan psikologi sosial, dan kedua, dengan mengembangkan ilmu administrasi yang mempertimbangkan nuansa kebijakan publik. (Ibrahim, 2009:6).

5. Paradigma V (1970) Administrasi Negara sebagai Administrasi. Keban menjelaskan (2008:39) bahwa paradigma sebelumnya telah diperbarui oleh paradigma ini. Paradigma ini memiliki tujuan yang berbeda dalam pikiran. Teori analisis kebijakan publik, organisasi, praktik administrasi dan manajemen modern, berbagai tantangan dengan birokrasi pemerintah, dan keprihatinan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yakni semua bidang yang menarik dalam administrasi negara. Sedangkan isu dan kepentingan umum menjadi fokus.
6. Paradigma ke VI (1990-Sekarang) Menurut Tamayao (2014), pemerintahan adalah pelaksanaan kekuasaan atau wewenang oleh para pemimpin politik dengan tujuan memajukan kesejahteraan warga negara. Ini adalah proses yang relatif rumit di mana berbagai kelompok masyarakat yang memegang kekuasaan, memberlakukan serta menyebarluaskan kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat dan institusi, dan mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial. Kedua, fungsi esensial pemerintahan modern, yang berbeda dengan pemerintahan tradisional, juga disebut sebagai "pemerintahan". Yang mana warga negara dan organisasi masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik yang

signifikan dan proses politik dianggap sebagai keseluruhan (Ikeanyibe, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa paradigma yang digunakan oleh peneliti adalah paradigma yang ke VI yaitu Paradigma Governance hal ini karena dalam penelitian ini mencakup bagaimana organisasi publik berfungsi, analisis kebijakan publik, dan berbagai permasalahan pada birokrasi pemerintahan serta berfokus pada tujuan mensejahterakan masyarakat dan partisipasi kelompok sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

1.6.4. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye “Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang pemerintah pilih, apakah melakukan sesuatu atau tidak melakukan (mendiadakan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do)” (Abdoellah, 2006:18).

Menurut James E. Anderson (1984) kebijakan merupakan suatu tindakan yang seorang atau sejumlah pelaku lakukan yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah (Abdoellah, 2006:16).

Menurut Syafii (2006:104) bahwa kebijakan (*policy*) dan kebijaksanaan (*wisdom*) harus dibedakan satu sama lain karena kebijakan merupakan perwujudan dari undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan pemerintahan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi setempat. Oleh karena itu, Syafii memandang kebijakan publik sebagai jenis solusi atas suatu masalah karena bertujuan untuk menghilangkan, mengurangi, dan mencegah hal-hal buruk terjadi sekaligus juga sebagai penganjur, inovator, dan katalisator untuk tindakan terbaik

yang mungkin dilakukan untuk mewujudkannya. tentang kebaikan. (Tahir, 2011:20).

Menurut Keban (2004:55) bahwa kebijakan publik dapat difahami sebagai kerangka kerja, proses, hasil, atau bahkan dari perspektif filosofis. Sebagai gagasan filosofis, kebijakan adalah seperangkat kondisi atau prinsip ideal. Sebagai produk jadi, kebijakan didefinisikan sebagai kumpulan kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai sebuah proses, kebijakan dilihat sebagai cara bagi organisasi untuk mempelajari apa yang diharapkan darinya, khususnya program dan mekanisme yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Akhirnya, sebagai kerangka kerja dijelaskan bahwa kebijakan adalah proses tawar-menawar dan negosiasi yang digunakan untuk mengembangkan isu dan strategi implementasi.(Tahir, 2011:20).

Menurut David Easton dalam "*The Political System*" (1953) Kebijakan publik didefinisikan sebagai distribusi nilai yang otoritatif untuk semua masyarakat, tetapi hanya rakyat yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini secara otoritatif. Semua sesuatu yang diputuskan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah adalah hasil dari distribusi nilai (keputusan) yang otoritatif ini. (Abdoellah, 2006:17).

Berdasarkan banyak pendapat ahli tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai kumpulan keputusan yang diciptakan oleh pemerintah guna mengatasi masalah dan mencapai tujuan dalam batas-batas peran dan wewenangnya.

1.6.4.1. Tahap- tahap Kebijakan

Starling (Tahir, 2011:13) menyampaikan bahwa adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik yaitu :

1. *Identification of needs*, yaitu dengan menggunakan berbagai kriteria, seperti analisis data, data statistik, model simulasi, analisis kausal, dan metode peramalan, maka dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk pembangunan.
2. Formulasi usulan kebijakan yang berisi kebijakan yang mempertimbangkan stabilitas teknologi, alternatif umum, pertimbangan strategis, dan analisis dampak lingkungan
3. Adopsi yang berisikan analisa kelayakan politik, penggunaan teknik penganggaran dan beberapa gabungan teori politik.
4. Implementasi program, yang berisi struktur organisasi, model penjadwalan, pengembangan penilaian harga, dan skenario implementasi.
5. Evaluasi yang membahas penggunaan metode-metode auditing, system informasi, evaluasi mendadak, dan eksperimental.

1.6.5. Implementasi Kebijakan

1. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Fokus perhatian pada implementasi kebijakan adalah peristiwa dan kegiatan yang muncul sesudah adanya pengesahan pedoman kebijakan negara, yang berisikan baik upaya untuk mengaturnya atau untuk memunculkan akibat atau dampak nyata dalam masyarakat atau peristiwa, seperti yang dikemukakan

oleh Solichin Abdul Wahab dalam kutipan yang menjelaskan arti dari implementasi ini. (Tahir, 2011:77).

2. Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975).

Proses implementasi suatu kebijakan ini sebagai abstraksi atau kinerja dari sebuah perwujudan kebijakan yang semula sengaja dilaksanakan untuk tercapainya hubungan berbagai variabel kinerja implementasi kebijakan yang tinggi. Model ini mengandaikan bahwa pelaksana, keputusan politik, dan efektivitas kebijakan publik mengikuti hubungan linier. (Tahir, 2011:71).

3. George C. Edwards III

George C. Edwards III menjelaskan bahwa Komunikasi (Communications), Sumber Daya (Resources), sikap (attitudes atau dispositions), dan organisasi birokrasi merupakan empat faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan publik (bureaucratic structure). Karena saling ketergantungannya, keempat elemen tersebut di atas harus diterapkan sekaligus. Tujuannya yakni untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan diterapkan. Menyederhanakan pemahaman dengan membaginya menjadi elemen-elemen dasarnya (diambil dari penjelasan implementasi). Implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang melibatkan interaksi berbagai faktor. Subkategori komponen yang mendasari ditampilkan sehingga dampaknya pada implementasi dapat dilihat. (Tahir, 2011:61).

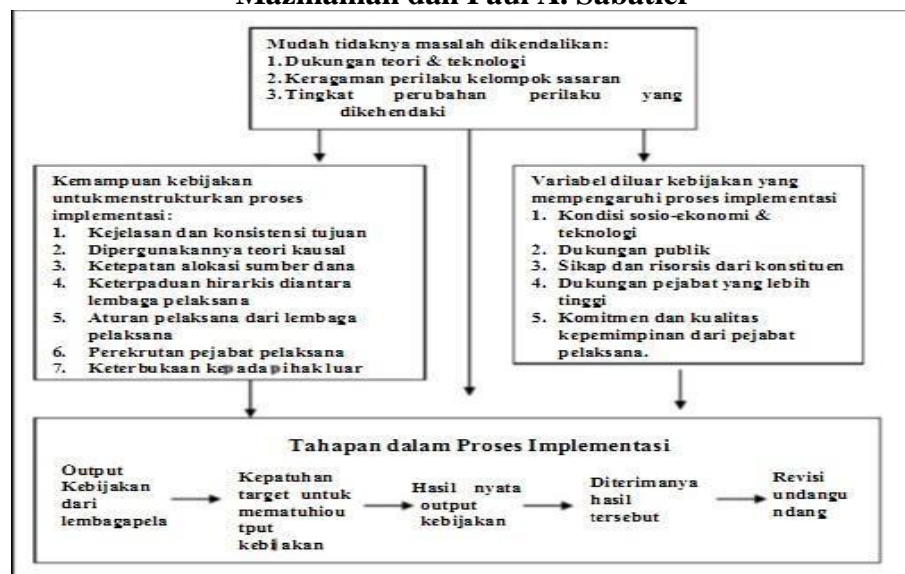
4. Charles O. Jones

Jones (1996: 166) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengoperasikan suatu program dengan tiga aktivitas utama kegiatan yang menjadi fokus perhatiannya (Tahir, 2011:81).

1.6.5.1. Model Implementasi Kebijakan

1. Model Implementasi dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Gambar 1. 2 Gambar 1.2 Model implementasi kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier



(Sumber: Nugroho, 2006:130)

a. Internal

1) Kejelasan atau konsistensi tujuan/sasaran

Suatu kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan haruslah berisikan konten yang konsisten dan jelas.

2) Sumber keuangan yang mencukupi

Hal yang tidak dapat dipungkiri dalam upaya mendukung pengimplementasian pada sebuah kebijakan yakni masalah keuangan/modal.

3) Teori kausal yang memadai.

Program atau kebijakan yang mempunyai dasar teori akan lebih dapat meyakinkan untuk mencapai keberhasilan, sebab sebelumnya telah teruji. Namun, beberapa teori perlu dimodifikasi sesuai dengan objek studi dan lingkungannya.

4) Integrasi organisasi pelaksana

Untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif, koordinasi di antara entitas pelaksana sangat penting. Ego sektor seringkali menjadi salah satu penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijakan.

5) Diskresi pelaksana

Masalah sering muncul selama implementasi kebijakan atau program. Akibatnya, agar implementasinya berhasil, pelaksana harus melakukan beberapa kebijaksanaan.

6) Rekrutmen dari pejabat pelaksana

Karena pejabat pelaksana tidak terlalu berkomitmen untuk menjalankan kebijakan atau proyek, seringkali muncul penyimpangan.

7) Akses formal pelaksana ke organisasi lain

Apakah pihak luar dapat mengambil bagian dalam implementasi kebijakan atau program relevan di sini.

b. Eksternal

1) Kondisi sosio ekonomi dan teknologi

Status sosial ekonomi masyarakat mengacu pada keseluruhan keadaan suatu masyarakat, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikannya. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai masyarakat terbuka modern atau masyarakat tradisional tertutup.

2) Perhatian pers terhadap masalah kebijakan

Didalam masalah kebijakan selalu mengundang perhatian pers, dan pandangan-pandangan atau penilaian terhadap masalah nya juga tergantung siapa yang sedang memperhatikan masalah nya tersebut.

3) Dukungan publik

Dukungan publik cenderung akan besar pada saat kebijakan yang disahkan dapat memberikan kemudahan ataupun insentif.

4) Sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama

Mereka dapat mengintervensi kebijakan yang dibuat oleh lembaga pelaksana dengan mengomentarkannya dalam upaya mengubah keputusan, misalnya yang didefinisikan sebagai salah satu metode yang dapat menjadi pengaruh implementasi kebijakan. Kemudian membuat pernyataan yang ditujukan kepada pembentuk undang-

undang dan mempublikasikan kritik terhadap kinerja lembaga pelaksana.

5) Dukungan kewenangan

Kewenangan penuh yang implementator miliki akan mempermudah pelaksanaan satu program atau kebijakan.

6) Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana

Kegagalan suatu program dapat disebabkan oleh penyimpangan dan ketidakmampuan dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang seringkali timbul pada saat implementasi.

2. Model Implementasi dari Van Meter dan Van Horn, yaitu :

Model implementasi kebijakan yang peneliti terapkan adalah model implementasi Van Meter dan van Horn, yang mengkaji kecenderungan para pelaksana, sumber daya, standar dan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Berikut justifikasinya:

a. Internal

1) Standar dan sasaran kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Tahir, 2011) menyatakan definisi kinerja kebijakan pada hakikatnya merupakan penilaian sejauh mana tujuan dan sasaran tertentu telah dicapai oleh pelaksana kebijakan. Hal ini berlaku untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan. Mengimplementasikan kebijakan publik ke titik dimana dapat

dianggap berhasil adalah tantangan ketika standar dan tujuan terlalu tinggi untuk diterapkan di tingkat warga negara.

2) Sumber daya

Memanfaatkan sumber daya yang ada sangat penting untuk mencapai keberhasilan pada proses implementasi kebijakan. Manusia itu sendiri merupakan faktor terpenting dalam upaya menentukan keberhasilan proses implementasi. Ketika sumber daya manusia yang unggul tersedia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh kebijakan yang ditetapkan pada titik-titik tertentu dalam proses implementasi. Namun, cukup sulit untuk diharapkan ketika kapabilitas dan kompetensi sumber daya ini dinilai rendah.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Penerimaan atau penolakan terhadap sikap lembaga pelaksana kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006), sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik. Baik organisasi formal maupun informal yang akan menjadi fokus para pelaksana akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Kualitas-kualitas yang sesuai bagi para pelaksana akan berdampak signifikan pada seberapa baik kinerja implementasi kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn menjelaskan beberapa unsur yang kemungkinan akan berpengaruh pada cara organisasi menerapkan kebijakan:

- a) Kompetensi serta ukuran staf lembaga
- b) Sejauh mana pilihan dan prosedur sub-unit diawasi secara hierarkis oleh lembaga pelaksana
- c) Sumber daya politik organisasi (misalnya dukungan di antara legislator dan eksekutif)
- d) Vitalitas sebuah organisasi
- e) Derajat komunikasi “terbuka”, yang meliputi jaringan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas dan tingginya tingkat kebebasan dalam berbicara dengan orang-orang di luar organisasi.
- f) Hubungan formal dan informal lembaga dengan "pembuat keputusan" atau "pelaksana keputusan".

4) Komunikasi antar organisasi

Menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974), standar tujuan harus dapat dipahami oleh pelaksana supaya kebijakan publik dapat dilakukan dengan sukses. Standar dan tujuan kebijakan harus disampaikan kepada pelaksana karena mereka bertanggung jawab untuk mencapainya.

b. Eksternal

1) Kondisi sosial ekonomi dan politik

Perlu disebutkan bahwa untuk melakukan penilaian kinerja implementasi kebijakan, penting untuk mempertimbangkan seberapa besar kebijakan publik yang ditetapkan didukung oleh lingkungan

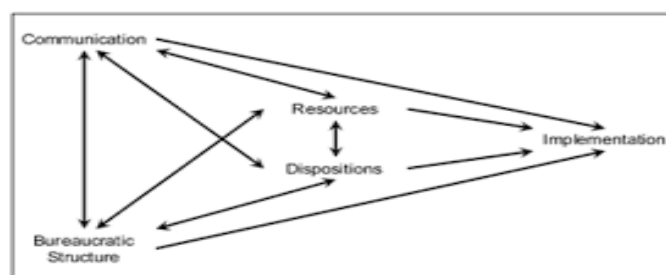
eksternal. Lingkungan eksternal harus dipertimbangkan dalam upaya implementasi kebijakan karena lingkungan sosial, ekonomi, atau politik yang tidak menguntungkan dapat menjadi penyebab kegagalan proses. Van Meter dan Van Horn juga mengajukan teori bahwa karakteristik dari pelaksana, kecenderungan pelaksana, dan penyelenggara itu sendiri akan dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yurisdiksi ataupun organisasi pelaksana.

2) Kecenderungan (*disposition*) dari para pelaksana

Sikap penolakan atau penerimaan dari agen pelaksana akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi kebijakan publik. Sangat memungkinkan kebijakan yang akan dijalankan bukan hasil dari formulasi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal yang paham dengan isu dan persoalan yang mereka hadapi. Kebijakan yang akan diterapkan yaitu kebijakan “top down”, yang memungkinkan pengambil keputusan tidak menyadari keinginan, kebutuhan, atau isu yang ingin mereka tangani.

3. Model Implementasi Edwards III, yaitu :

Gambar 1. 3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III



Sumber : Dr. Arifin Tahir, M.Si dalam Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berikut merupakan penjelasan dari faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan:

1) Komunikasi

Mereka yang bertugas mengimplementasikan suatu kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan agar berjalan dengan baik. Individu yang cakap harus mendapatkan instruksi untuk menerapkan kebijakan secara jelas, akurat, dan konsisten. Tiga faktor, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan, sangat penting untuk komunikasi.

- a. Transmisi mensyaratkan bahwa putusan kebijakan dan perintah dikomunikasikan kepada individu yang tepat karena mereka yang melaksanakan keputusan harus tahu persis apa yang harus mereka lakukan.
- b. Konsistensi, artinya agar eksekusi kebijakan berhasil, petunjuk pelaksanaannya harus jelas dan konsisten.
- c. Kejelasan, artinya agar kebijakan dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud, pedoman pelaksanaan tidak hanya harus disetujui oleh pelaksana tetapi juga dapat dipahami.

2) Sumber daya

Kewenangan untuk memastikan bahwa pada kebijakan ini dilaksanakan persis seperti yang dimaksudkan, berbagai fasilitas (termasuk bangunan, tanah, persediaan dan peralatan,), dan staf dengan jumlah yang tepat terhadap keahlian yang diperlukan, informasi yang memadai, dan relevan tentang bagaimana menerapkan

kebijakan dan pada penyesuaian lain yang ikut terlibat dalam implementasi adalah sumber daya yang penting. Sumber-sumber penting untuk mengimplementasikan kebijakan meliputi:

- a. Staf, selain memenuhi jumlah yang sesuai kebutuhan, harus berkualitas tinggi dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- b. Informasi, Ada dua jenis informasi yang digunakan dalam penerapan kebijakan informasi: informasi tentang cara menerapkan kebijakan dan informasi tentang kepatuhan personil-personil lain terhadap persyaratan hukum pemerintah.
- c. Wewenang, untuk mengimplementasikan kebijakan dengan benar, harus ada otoritas resmi atau wewenang formal yg dilaksanakan dengan efektif.
- d. Fasilitas, yang mengacu pada sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan.

3) Disposisi/sikap pelaksana

Dalam proses pendekatan mengenai bagaimana kebijakan publik diimplementasikan, sikap pelaksana menjadi pertimbangan utama. Pelaksana kebijakan tidak hanya harus menyadari apa yang perlu dilaksanakan dan mempunyai kapabilitas yang diperlukan untuk melakukannya, tetapi juga memiliki motivasi atau keinginan untuk

melakukannya jika mereka ingin berhasil mengimplementasikan kebijakan.

4) Struktur birokrasi

Tidak mungkin membicarakan lembaga pelaksana suatu kebijakan tanpa menyebut struktur birokrasinya. Struktur birokrasi yakni karakteristik, norma sosial, dan pola interpersonal atau hubungan yang terjadi secara berulang dalam badan eksekutif dan memiliki hubungan potensial dan aktual dengan alat yang mereka gunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Ketidakefektifan struktur birokrasi menghambat pelaksanaan kebijakan meskipun ada cukup sumber daya yang tersedia dan pelaksana mau dan sadar akan apa yang harus dilakukan. Edwards III mengidentifikasi dua aspek birokrasi, antara lain:

- a. *Standar Operating Procedures (SOP)* atau prosedur operasi standar untuk ukuran pekerjaan dasar. Ini adalah reaksi internal terhadap adanya keterbatasan atau kendala waktu dan sumber daya pelaksana serta kebutuhan akan konsistensi dalam pengelolaan organisasi yang besar dan kompleks.
- b. Fragmentasi, adanya pengaruh eksternal pada tubuh birokrasi, termasuk tuntutan dari kelompok kepentingan, komite legislatif, konstitusi negara, pejabat eksekutif, dan sifat kebijakan yang berpengaruh pada organisasi birokrasi pemerintah.

4. Model Implementasi Charles O. Jones

Charles o. Jones menjelaskan bahwa ada aktivitas yang menjadi pengaruh dalam implementasi kebijakan, antara lain:

- a. Organisasi, menyelaraskan unit, sumber daya, dan metode untuk mendukung operasi program.
- b. Interpretasi, yaitu mentransformasikan program ke arah yang sesuai, agar dapat diterima dan dilaksanakan.
- c. Aplikasi (penerapan), yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas rutin seperti penyediaan barang dan jasa.

Dari banyak definisi dari implementasi dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi dapat dipahami sebagai proses mempraktekkan kebijakan yang sudah dikembangkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Perlu ditambahkan juga bahwa sifat tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana tujuan itu dinyatakan memiliki dampak yang signifikan terhadap proses implementasi. Maka dari itu, tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan dapat berdampak pada semua tahap lain dari proses kebijakan, menjadikan implementasi sebagai fase penting dalam proses tersebut. Sebuah kebijakan mencakup pengukuran pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, sering dikenal sebagai efektifitas implementasi kebijakan. Riant (2012:707-710) mengemukakan 5 ketepatan yang harus dipenuhi pada pelaksanaan keefektidan implementasi kebijakan, antara lain :

- a) Ketepatan kebijakan dapat ditentukan dengan melihat seberapa jauh kebijakan yang ada mencakup hal-hal yang benar-benar dapat mengatasi masalah yang dihadapi atau memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
- b) Ketepatan pelaksanaan, yang dapat berupa pengambilan kebijakan monopoli atau kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau masyarakat dan lembaga yang dapat bertindak sebagai pelaksana.
- c) Ketepatan sasaran atau target, meliputi kesesuaian sasaran yang telah diubah dan apakah sesuai dengan rencana semula atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lainnya.
- d) Ketepatan lingkungan, ada dua jenis lingkungan: internal dan eksternal. Lingkungan internal berisi kebijakan yang mengatur bagaimana lembaga dan pembuat kebijakan berinteraksi. Implementasi kebijakan dan persepsi publik terhadap kebijakan keduanya dianggap eksternal.
- e) Ketepatan proses, terdapat 3 proses antara lain : *Policy Acceptance* (publik paham bahwa kebijakan yang ada sebagai aturan dan pemerintah sendiri paham itu sebagai tugasnya), dan birokrat siap menjadi peleksana kebijakan). *Policy Adaption* (publik sendiri menyetujui kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menyetujuinya), *strategic readiness* (publik siap menjalankan tugas atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan)

1.6.6. Pendidikan

Menurut Profesor Toshiko Kinoshita (Nurkholis, 2013) pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi dapat berkembang karena adanya pendidikan. Fungsi teknis-teknologi, yang merupakan salah satu dari lima fungsi pendidikan menurut praksis manajemen modern, mengacu pada kontribusi pendidikan terhadap kemajuan teknologi. Misalnya, pendidikan dapat ikut membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang dalam ekonomi yang kompetitif.

Pendidikan adalah investasi penting dalam menjalani kehidupan sosial. Berbagai macam informasi, termasuk pengetahuan etika, agama, disiplin, dan lain-lain, dapat diperoleh melalui pendidikan di Indonesia. Dalam pendidikan Indonesia, pengembangan pada pikiran sebagian besar dicapai di sekolah atau pada perguruan tinggi melalui studi subjek yang diselidiki dengan memecahkan soal-soal, pemecahan berbagai jenis masalah, kemudian menganalisis objek, menarik kesimpulan, dan memecahkan lebih banyak masalah.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat. Berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

1.6.7. Program Indonesia Pintar

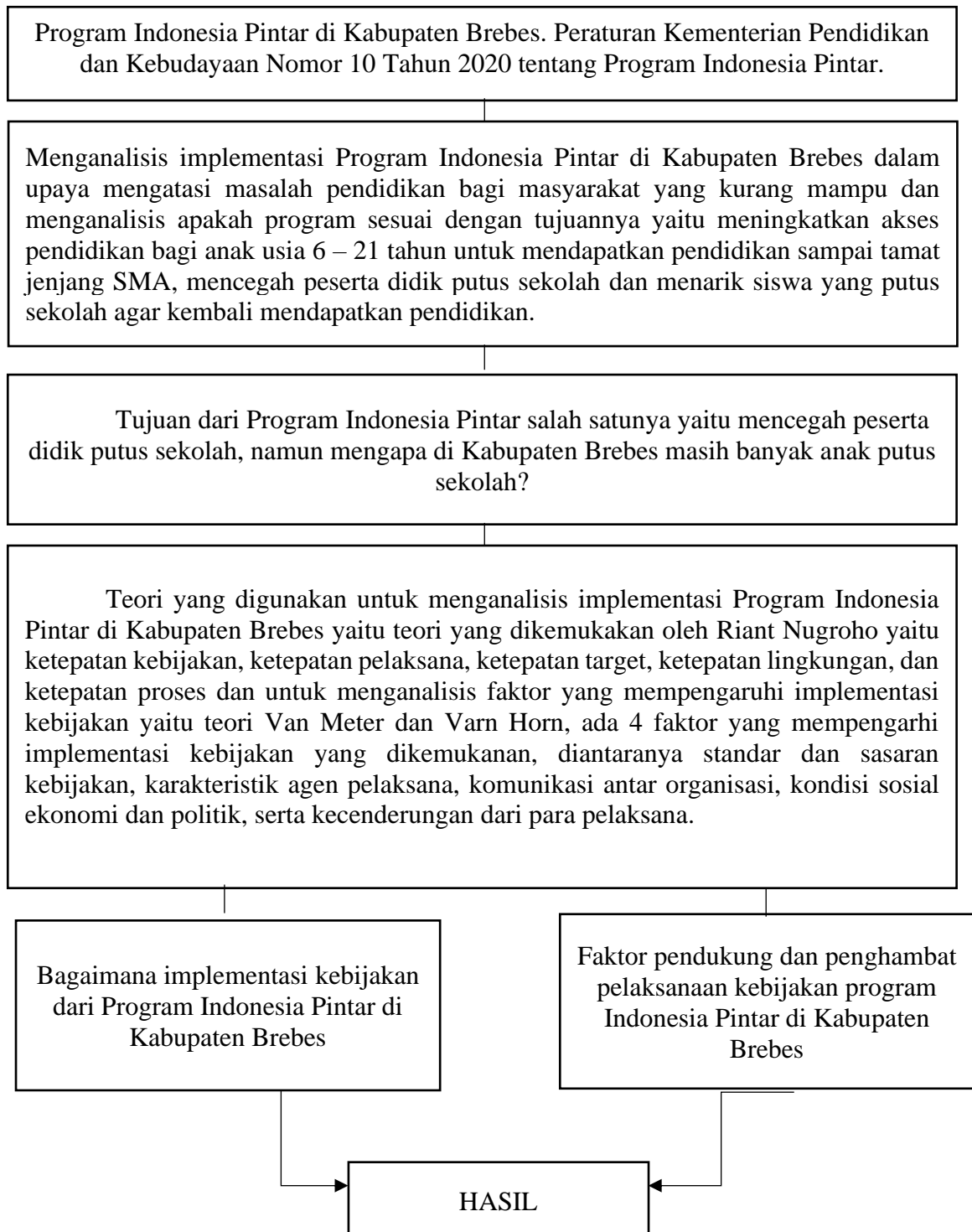
Menjadi satu diantara program jaminan sosial di bidang pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki tujuan untuk menjawab persoalan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Dalam konteks ini, PIP adalah salah satu komponen upaya pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia. Salah satu inisiatif nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), adalah Program Indonesia Pintar.

Menurut Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai kelanjutan dan perluasan dari tujuan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Ini memberikan bantuan keuangan dari pemerintah kepada siswa yang orang tuanya tidak mau atau tidak mampu membayar pendidikan anak-anak mereka.

Besaran bantuan PIP tersebut dipergunakan sebagai pemenuhan biaya pendidikan individu siswa sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

1.6.8. Alur Pikir Teoritis

Gambar 1. 4 Kerangka Pikir Implementasi Program Indonesia Pintar



1.7. Operasionalisasi Konsep

Fenomena yang akan penulis amati yaitu Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar untuk mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten Brebes menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berwujud uang tunai yang diberikan kepada peserta didik, program ini menjadi kelanjutan dan upaya perluasan sasaran dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), program ini diluncurkan pada 3 November 2014 yang mana tertuang dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Tujuan Program Indonesia Pintar yaitu untuk meningkatkan akses anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk bersekolah. Dimana dalam Program Indonesia Pintar terdapat fasilitas Kartu Indonesia Pintar yang merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya (usia 6 – 21 tahun) secara gratis. Fungsi kartu tersebut sebagai penyimpanan dana tunai dari pemerintah yang diberikan kepada penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) untuk bersekolah secara gratis.

Penulis menggunakan fenomena penelitian untuk mempermudah penulis dalam menentukan alur pikir dan penyesuaian teori tentang Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Brebes, adapun fenomena dan indikasi yang akan diteliti yaitu :

Tabel 1. 8 Fenomena dan Indikasi

No	Fenomena	Gejala yang diamati	Item
Proses Implementasi			
1	Ketepatan kebijakan	Kebijakan memuat hal-hal yang harus dipecahkan	Kebijakan yang ada dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dipecahkan dan kejelasan isi kebijakan yang sesuai dengan permasalahan di masyarakat
2	Ketepatan pelaksana	Peran pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktor implementasi kebijakan yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan 2. Tugas pokok dan fungsi aktor implementasi dalam pelaksanaan kebijakan
3	Ketepatan target	Kondisi target	Kesiapan target dalam pelaksanaan kebijakan dan adanya intervensi kebijakan
4	Ketepatan lingkungan	Lingkungan internal dan lingkungan eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan internal, adanya interaksi diantara lembaga perumus dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. 2. Lingkungan eksternal, interpretasi lembaga strategis (media massa maupun kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kebijakan
5	Ketepatan proses	Kesiapan masyarakat dan pelaksana	Kesiapan masyarakat dan pelaksana kebijakan dalam memahami, menerima, dan siap menjadi bagian dari kebijakan.
Faktor- faktor Pengaruh Implementasi Kebijakan			

1	Standar dan sasaran kebijakan	Kejelasan kinerja kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas standar kebijakan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Brebes 2. Ketepatan sasaran kebijakan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Brebes
2	Karakteristik agen pelaksana	Karakteristik, norma dan pola hubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan struktur organisasi 2. Pembagian tugas
3	Komunikasi	Transmisi, konsistensi dan kejelasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dari para pelaksana kebijakan Program Indonesia Pintar 2. Kejelasan komunikasi kebijakan Program Indonesia Pintar dari para pelaksana 3. Intensitas sosialisasi kebijakan Program Indonesia Pintar 4. Konsistensi pemerintah-kebijakan Program Indonesia Pintar
4	Kondisi sosial, ekonomi, dan politik	Pengaruh lingkungan eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas lingkungan yaitu kemampuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan lembaga pendidikan dalam mendukung kebijakan 2. Kestabilan peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan lembaga pendidikan dalam mendukung kebijakan 3. Kompleksitas, yaitu banyaknya campur tangan lembaga diluar organisasi pelaksana Program Indonesia Pintar yang mempengaruhi kebijakan
5	Sikap (disposisi)	Antusias dan responsif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi pelaksana terhadap kebijakan Program Indonesia Pintar

	agen pelaksana		2. Respon pelaksana terhadap kebijakan Program Indonesia Pintar 3. Tindakan pelaksana terhadap kebijakan Program Indonesia Pintar
--	----------------	--	--

Fenomena dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Metode penelitian didefinisikan oleh Sofyan Syafri Harahap sebagai suatu proses yang digunakan untuk melakukan penelitian, yaitu suatu proses tentang bagaimana memperoleh, merumuskan, dan menyajikan kebenaran dari objek atau fenomena yang diteliti. Ibnu Hadjar, dilain sisi mendefinisikan metode penelitian sebagai teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibuat untuk memajukan pengetahuan. (Rahmadi, 2011:6).

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (Candra Guzman & Oktarina, 2018) adalah studi yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dihadapi subjek penelitian. Karena tidak dimanipulasi dan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, menafsirkan kembali kondisi fenomena sosial yang melekat pada masalah yang diteliti, penelitian ini juga dilakukan secara ilmiah. Teknik deskriptif kemudian menjadi cara untuk

menganalisis status sekelompok orang, objek, seperangkat keadaan, sistem ide, atau kelas kejadian saat ini, menurut Nazir (2013: 43). (Aulia & Yulianti, 2019).

Desain penelitian kualitatif deskriptif yang ada pada penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan persoalan yang ada di lapangan dengan menjelaskannya dan menghubungkan sebab akibat masalah tersebut terjadi untuk memperoleh gambaran realitas mengenai implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung Brebes.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs Penelitian didefinisikan sebagai wilayah atau tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Peneliti menentukan situs penelitian atau lokasi penelitian di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung dipilih oleh peneliti sebab peneliti ingin melakukan pengkajian secara dalam pada permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, peneliti juga berharap mendapatkan sebuah temuan yang dapat membantu dalam memecahkan masalah dari permasalahan yang terjadi pada Program Indonesia Pintar.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian didefinisikan sebagai hal yang penting kedudukannya yang digunakan dalam pengumpulan data baik berupa benda maupun manusia. Pada Penelitian ini, dibutuhkan informasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. yang terkait dalam Implementasi Program Indonesia Pintar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP N 3 Satu Atap

Bantarkawung diantaranya ialah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Penanggungjawab Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung, dan Walimurid siswa SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa kalimat-kalimat penjelas, berupa tulisan, maupun pendeskripsian kenyataan-kenyataan yang terdapat pada lapangan atau dengan kata lain jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk deskriptif.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintarpada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Brebes” ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data primer

Menurut Sugiyono (2006:137), “data primer didefinisikan sebagai sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data yang diperoleh merupakan data yang diolah sendiri atau diperoleh langsung dari objeknya (Imron, 2019). Dalam hal ini data yang diperoleh merupakan data yang didapat dari hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu dengan informan yang mengetahui tentang Kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung Kabupaten Brebes.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2006:137) data sekunder didefinisikan sebagai “sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Tidak langsung di sini memiliki maksud bahwa data yang didapatkan yakni data yang bersumber dari objek atau dengan menggunakan dokumen-dokumen, buku, dan artikel pendukung lainnya (Imron, 2019). Dalam hal ini, pada penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu regulasi serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung Kabupaten Brebes.

1.8.6. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai langkah yang paling strategis pada penelitian, karena tujuan utama dari dilakukannya penelitian ialah untuk mendapatkan data. Berikut merupakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Wawancara dilaksanakan dengan dengan informan yang mengetahui tentang Kebijakan Program Indonesia Pintar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Brebes, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung dan Masyarakat Bantarkawung yang menjadi penerima PIP. Dimana dalam menentukan informan untuk kegiatan wawancara menggunakan cara purposive sampling untuk menentukan informan yang

layak dijadikan sampel. Dengan digunakannya teknik ini pertimbangan yang diberikan adalah kepala keluarga yang menerima Kartu Indonesia Pintar sehingga hasil penelitian dapat lebih memberikan hasil yang bisa mewakili keadaan populasi.

b. Dokumentasi

Catatan peristiwa yang sudah berlalu didefinisikan sebagai dokumentasi. Dokumen bisa berupa gambar, tulisan, atau karya-karya yang diabadikan dari seseorang. Dokumentasi yang dilakukan peneliti merupakan dokumentasi saat dilakukan observasi di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes

c. Studi kepustakaan

Dapat disebut sebagai pengumpulan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber seperti artikel, buku, dan jurnal. Studi kepustakaan yang digunakan peneliti seperti artikel, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan Implementasi Program Indonesia Pintar.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Sugiyono (2008:244) adalah proses mencari secara sistematis data dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain sehingga dapat dipahami dengan jelas dan, tentu saja, dikomunikasikan kepada orang lain. (Pratiwi, 2017).

Prosedur penelitian mencakup langkah yang sangat penting yang disebut analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah tahap pengumpulan data selesai. Selain itu, menurut pendekatan analisis Miles dan

Huberman dalam Sugiyono (Wanto, 2018) ada tiga tindakan simultan yang terjadi selama analisis data, yaitu:

- a. *Data Reduction* atau reduksi data ialah proses memilih, berkonsentrasi pada penyederhanaan, mengabstraksikan, dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang berhubungan dengan kerja lapangan. Proses analisis data dimulai pada langkah ini.
- b. *Data Display* atau tampilan data, yaitu kumpulan data terstruktur yang memungkinkan pengguna membuat keputusan dan mengambil tindakan. Penyajiannya berupa sinopsis dan analisis tentang bagaimana teori-teori tersebut berhubungan.
- c. *Conclusion Drawing / Verification* (menarik kesimpulan) adalah kegiatan menemukan makna yang melibatkan mengidentifikasi keturunan, pola, pembenaran, pengaturan potensial, rantai kausal, dan proposisi. Kesimpulannya adalah pernyataan bahwa ada masalah dengan penelitian ini.

1.8.8. Kualitas Data

Ketika tidak ada lagi ambiguitas mengenai subjek penelitian, temuan data dari penelitian kualitatif dikatakan valid atau reliabel. Penelitian kualitatif mengambil bentuk penjelasan berupa kalimat atau deskripsi. Menurut Moleong (Bachri, 2010) mengklaim bahwa empat kriteria validitas data antara lain kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian yang akan berdampak pada kualitas data.

Moleong dalam bukunya menjelaskan “Metodologi Penelitian Kualitatif” terdapat teknik pemeriksaan standar keabsahan suatu data, di mana peneliti mengambil teknik triangulasi yang digunakan untuk teknik analisis data yang dapat dilakukan secara:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi sebagai bentuk pertanyaan
- b. Pengecekan data dengan banyak sumber;
- c. Memanfaatkan beberapa metode dengan harapan kepercayaan terhadap data lebih tinggi.

Teknik ini mengutamakan sebuah keefektifan proses dan hasil yang ditargetkan. Teknik ini juga menguji adanya kesesuaian antara metode dengan proses yang berjalan selama pengambilan data. Analisis data menggunakan metode triangulasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian dan proses pengumpulan data.

Langkah-langkah yang diterapkan guna menganalisis data dengan menggunakan teknik triangulasi mengutip dalam Moleong (Bachri, 2010) yaitu:

- a. Perbandingan antara data observasi dan data wawancara,
- b. Perbandingan antara apa yang seseorang katakan di depan umum dan apa yang dikatakan mereka secara pribadi
- c. Perbandingan antara apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dari waktu ke waktu
- d. Perbandingan antara situasi dan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang lain

- e. Perbandingan antara temuan wawancara dan isi dokumen terkait—ini hanya beberapa contoh.

Menurut Sugiyono (Pratiwi, 2017) Ada tiga macam metode triangulasi. Dengan penjelasan berikut, ketiga jenis tersebut adalah triangulasi sumber data, triangulasi metode pengumpulan data, dan triangulasi waktu pengumpulan data:

- a. Triangulasi sumber adalah teknik untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan data melalui sumber lain yang telah memperoleh data sebelumnya.
- b. Triangulasi teknik ialah teknik untuk melakukan pengujian keabsahan data dengan membandingkan sebuah data dari berbagai sumber yang sama dengan metode yang tidak sama;
- c. Triangulasi waktu adalah teknik untuk melakukan pengujian dengan mengumpulkan dan membandingkan data dari berbagai waktu atau situasi untuk melihat hasilnya.